PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

Muhammad Irsyad Abdullah Rumwaropen
NPP. 33.1206
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email:

Pembimbing Skripsi: Ir. Achmad Nur Sutikno, M. Si
Email:

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Teluk Bintuni Regency presents a development paradox. Despite having a high Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita driven by the LNG Tangguh oil and gas industry, the poverty rate remains very high at 26.99%. A significant welfare gap exists between large-scale investments and the living conditions of indigenous communities, who continue to face dependency on government assistance, geographical isolation, and limited human resource capacity.* ***Purpose:*** *This study aims to identify community empowerment strategies that can be implemented to alleviate poverty among local communities in Teluk Bintuni Regency.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. The analysis was guided by the Deprivation Trap theory and the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. Data were collected through field observations, documentation, and in-depth interviews. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles et al. (2014).* ***Result:*** *The findings indicate that, based on the Deprivation Trap analysis, the dimensions of isolation and powerlessness are the most dominant factors contributing to the persistence of poverty. In contrast, the ABCD approach reveals that local communities possess significant assets, including abundant natural resources, strong social capital, functioning customary institutions, developing human resources, and economic opportunities generated by the LNG Tangguh industry. The SWOT analysis places Teluk Bintuni Regency in Quadrant III (turn-around strategy), indicating that substantial development opportunities exist but have not been optimally utilized due to persistent internal weaknesses within the community. Therefore, the recommended priority strategies include capacity building, strengthening local institutions, providing sustainable business mentoring, improving financial literacy, and integrating local assets into broader economic value chains to support sustainable poverty reduction.* ***Conclusion:*** *The study concludes that poverty alleviation strategies should focus on addressing internal weaknesses in order to capitalize on external opportunities (W–O strategy). Recommended actions include corporate hygiene and sanitation standards training, financial management education,*

permanent cluster-based economic mentoring, and strengthening the role of local government as an off-taker for community products.
Keywords: *Community Empowerment, Poverty Alleviation, Strategy, Teluk Bintuni.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah paradoks yang memiliki PDRB per kapita tinggi berkat industri migas LNG Tangguh, namun tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi mencapai 26,99%. Terdapat kesenjangan kesejahteraan yang nyata antara investasi besar dengan kondisi masyarakat asli yang masih terjebak dalam siklus ketergantungan bantuan pemerintah, keterisolasian geografis, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teori *Deprivation Trap* dan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan model Miles et al. (2014). **Hasil/Temuan:** Berdasarkan analisis *Deprivation Trap*, dimensi isolation dan powerlessness menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk lingkaran kemiskinan. Di sisi lain, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai aset strategis berupa sumber daya alam yang melimpah, modal sosial yang kuat, kelembagaan adat yang masih berfungsi, sumber daya manusia yang mulai berkembang, serta peluang ekonomi melalui keberadaan industri LNG Tangguh. Hasil analisis SWOT menempatkan Kabupaten Teluk Bintuni pada Kuadran III (*turn-around strategy*), yang menunjukkan bahwa peluang pembangunan cukup besar namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih kuatnya kelemahan internal masyarakat. Oleh karena itu, strategi prioritas yang direkomendasikan adalah peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pendampingan usaha berkelanjutan, peningkatan literasi keuangan, serta integrasi aset lokal ke dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, strategi harus difokuskan pada pembenahan kelemahan internal untuk merebut peluang eksternal (W-O). Saran yang diajukan mencakup pelatihan standar higiene korporasi, edukasi manajemen keuangan, pendampingan ekonomi permanen berbasis kluster wilayah, serta penguatan peran pemerintah sebagai pembeli pertama (*off-taker*).
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan, Strategi, Teluk Bintuni.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia (Handayani et al., 2023). Sebagai negara berkembang dengan

karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, Indonesia menghadapi kemiskinan yang bersifat multidimensional, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik (Jeddawi et al., 2025). Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai agenda prioritas pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta berbagai program nasional yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren menurun, kesenjangan antarwilayah masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 8,57 persen. Namun demikian, kawasan Papua masih menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata, terutama pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan cukup serius adalah Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kab/Kota	Jumlah (%)	Selisih (%)
Pegunungan Arfak	31.76	3.29
Teluk Wondama	28.47	1.48
Teluk Bintuni	26.99	0.16
Manokwari Selatan	26.83	5.97
Fakfak	20.86	2.41
Manokwari	18.45	4.04
Kaimana	14.41	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tahun 2024, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat kemiskinan sebesar 26,99 persen dan menempati peringkat ketiga tertinggi di Papua Barat setelah Kabupaten Pegunungan Arfak (31,76 persen) dan Kabupaten Teluk Wondama (28,47 persen). Dengan jumlah penduduk sekitar 83.074 jiwa, persentase tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 22 ribu penduduk Teluk Bintuni masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan tersebut menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai

salah satu daerah prioritas nasional dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat melalui kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan.

Menariknya, tingginya tingkat kemiskinan tersebut berbanding terbalik dengan kapasitas ekonomi daerah. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Indonesia. Kondisi ini didukung oleh keberadaan industri minyak dan gas bumi berskala internasional, yaitu proyek LNG Tangguh yang menjadi salah satu penghasil gas alam cair terbesar di Indonesia. Aktivitas industri tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan, yaitu daerah kaya sumber daya alam tetapi masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kondisi tersebut juga tercermin dari meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio gini Kabupaten Teluk Bintuni meningkat dari 0,377 pada tahun 2022 menjadi 0,383 pada tahun 2023. Peningkatan rasio gini tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum berlangsung secara merata. Sebagian besar keuntungan ekonomi yang dihasilkan sektor migas belum mampu menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di kampung-kampung sekitar wilayah operasi industri. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan geografis wilayah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 18.637 km² dan merupakan salah satu kabupaten terluas di Papua Barat, dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sekitar 4,4 jiwa per km². Sebaran penduduk yang terpencar menyebabkan biaya transportasi dan distribusi barang menjadi tinggi sehingga membatasi akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kondisi geografis tersebut berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi produktif masyarakat serta terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pemerintahan (Rwebugisa & Usinger, 2021).

Selain itu, kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data BPS Tahun 2024 menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 12,62 tahun, namun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya sebesar 8,67 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat lokal memiliki keterbatasan kompetensi untuk mengakses pekerjaan formal yang membutuhkan keterampilan dan kualifikasi tertentu (Nugroho & Alifa, 2025). Akibatnya, masyarakat lokal lebih banyak bekerja pada sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah.

Di sisi lain, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi sosial dan budaya yang besar untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Keberadaan tujuh suku asli yang dikenal sebagai Subitu atau Tujuh Suku Teluk Bintuni, yaitu Suku Sebyar, Irarutu, Wamesa, Kuri, Sougb, Moskona, dan Sumuri, merupakan modal sosial yang penting dalam pembangunan daerah. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan sumber daya alam yang dapat

dikembangkan menjadi basis kegiatan ekonomi produktif. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam strategi pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai program bantuan sosial dan perlindungan sosial yang selama ini dijalankan pemerintah memang mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dalam jangka pendek. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat (Chen et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat (Mason & Beard, 2008). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Kamruzzaman, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu instrumen utama pembangunan desa.

Dalam konteks Kabupaten Teluk Bintuni, strategi pemberdayaan masyarakat lokal menjadi penting karena mampu menjawab berbagai akar permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketergantungan ekonomi, keterisolasian wilayah, dan rendahnya akses terhadap peluang usaha produktif. Melalui pendekatan pemberdayaan yang berbasis potensi lokal, masyarakat dapat didorong menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan. Pendekatan ini juga memungkinkan pengembangan usaha ekonomi berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan, hasil hutan bukan kayu, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan masyarakat adat.

Penelitian terdahulu mengenai kemiskinan di Papua umumnya lebih banyak berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan, dampak industri ekstraktif terhadap pembangunan daerah, maupun evaluasi program bantuan sosial. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal yang berbasis potensi dan aset masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (*Research Gap*)

Kabupaten Teluk Bintuni menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks di tengah tingginya potensi ekonomi daerah yang dimiliki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 26,99 persen dan menempati posisi ketiga tertinggi di Provinsi Papua Barat. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan status Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Indonesia yang didukung oleh keberadaan industri migas LNG Tangguh. Selain itu, rasio gini yang meningkat dari 0,377 pada tahun 2022 menjadi 0,383 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses

terhadap lapangan kerja formal, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, sehingga diperlukan strategi yang mampu mendorong kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, pengaruh indikator ekonomi makro terhadap kemiskinan, dampak perkembangan industri terhadap masyarakat lokal, maupun pendekatan pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Papua. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data statistik atau kajian konseptual mengenai kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan, potensi masyarakat, serta peluang pengembangan ekonomi berbasis aset lokal di Kabupaten Teluk Bintuni masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian ini menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kapasitas, partisipasi, dan pemanfaatan potensi lokal masyarakat sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Meskipun Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Indonesia yang didukung oleh keberadaan industri migas LNG Tangguh, tingkat kemiskinan daerah ini masih tergolong tinggi. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 26,99 persen dan menempati posisi ketiga tertinggi di Provinsi Papua Barat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, peningkatan rasio gini dari 0,377 pada tahun 2022 menjadi 0,383 pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah kampung dan distrik terpencil.

Penelitian ini juga penting karena berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah yang selama ini dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses transportasi, minimnya kesempatan

kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Kondisi geografis yang luas dengan persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterisolasian dan kesulitan mengakses layanan publik maupun peluang ekonomi produktif. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya strategi yang tepat, maka ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan aktivitas ekonomi sektor ekstraktif akan semakin tinggi sehingga menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena mampu meningkatkan kapasitas, keterampilan, kemandirian, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat, seperti sektor pertanian, perikanan, hasil hutan bukan kayu, ekonomi kreatif, serta modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui strategi pemberdayaan yang tepat, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Dari aspek keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi karena memberikan kajian empiris mengenai strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah Papua yang memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang khas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan, pengaruh indikator ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan, maupun dampak industrialisasi terhadap masyarakat lokal. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat lokal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, kebijakan publik, dan pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Organisasi Perangkat Daerah terkait, pemerintah kampung, lembaga adat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat adat, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan di Kabupaten Teluk Bintuni.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian Soleh

(2018) yang berjudul *"Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi"* menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Jambi masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin cenderung meningkat yang ditandai dengan kenaikan garis kemiskinan serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya perumusan strategi dan kebijakan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan. Namun, penelitian tersebut menggunakan pendekatan *mixed method* yang didominasi analisis data sekunder pada tingkat provinsi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada data primer melalui wawancara dan observasi di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penelitian Sarjito (2024) yang berjudul *"Membangun Kesatuan Bangsa Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua"* menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan budaya memiliki potensi transformatif dalam membangun identitas, partisipasi, dan inklusi masyarakat Papua. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan responsif budaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Temuan tersebut memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan instrumen penting dalam pembangunan wilayah Papua. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada upaya membangun kesatuan bangsa dan integrasi sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat lokal sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Selanjutnya, penelitian Rauf et al. (2019) yang berjudul *"Daya Saing Wilayah dan Pengaruh Product Domestic Regional Bruto Perkapita serta Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat"* menunjukkan bahwa tidak semua sektor ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Papua Barat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, meskipun pengaruh PDRB per kapita tidak signifikan. Penelitian tersebut memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Namun demikian, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis statistik data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang lebih kontekstual.

Penelitian Januar (2019) yang berjudul *"Peluang dan Tantangan Orang Asli Papua Menghadapi Perkembangan Industri di Kabupaten Teluk Bintuni"* menunjukkan bahwa keberadaan industri di Kabupaten Teluk Bintuni memberikan peluang berupa peningkatan perekonomian lokal, pengembangan kesejahteraan masyarakat, dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi Orang Asli Papua. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat lokal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan, minimnya modal usaha, lemahnya kelembagaan, dan pola pemenuhan kebutuhan yang masih bersifat subsisten. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dalam memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi daerah. Meskipun memiliki kesamaan lokus dan karakteristik masyarakat yang diteliti, penelitian tersebut

berfokus pada dampak perkembangan industri terhadap Orang Asli Papua, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengatasi kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu, penelitian Cobbinah et al. (2013) yang berjudul *"Dynamics of Poverty in Developing Countries: Review of Poverty Reduction Approaches"* menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang memiliki karakteristik berbeda pada setiap wilayah sehingga pendekatan pengukurannya tidak dapat disamaratakan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kemiskinan perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Penelitian ini memberikan landasan konseptual bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus dirancang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut bersifat konseptual dan membahas kemiskinan dalam konteks negara berkembang secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang berorientasi pada analisis statistik, evaluasi kebijakan, pembangunan sosial budaya, maupun dampak pembangunan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan, pengaruh indikator ekonomi makro, atau dampak industrialisasi terhadap masyarakat Papua. Sementara itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis kemiskinan secara lebih mendalam melalui perspektif pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga dapat dirumuskan strategi yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan analisis terhadap lima penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian mengenai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat masih didominasi oleh pembahasan strategi pengentasan kemiskinan pada level makro (Soleh, 2018), pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Papua (Sarjito, 2024), pengaruh indikator ekonomi terhadap tingkat kemiskinan (Rauf et al., 2019), dampak perkembangan industri terhadap Orang Asli Papua (Januar, 2019), serta pendekatan konseptual mengenai dinamika kemiskinan dan strategi pengurangannya pada negara berkembang (Cobbinah et al., 2013). Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada analisis faktor penyebab kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan, pembangunan sosial budaya, maupun dampak pembangunan ekonomi terhadap masyarakat lokal.

Kebaruan ilmiah penelitian ini diperoleh melalui analisis komparatif terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,

pembangunan daerah, dan masyarakat Papua. Kebaruan tersebut dianalisis berdasarkan aspek teori, metode, fokus penelitian, dan karakteristik objek penelitian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Soleh (2018) yang mengkaji analisis dan strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi. Dari aspek teori, penelitian Soleh berorientasi pada analisis kemiskinan dan kebijakan pengentasan kemiskinan secara makro, sedangkan penelitian ini menggunakan integrasi teori *Deprivation Trap* dari Chambers (1983) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dari Kretzmann dan McKnight (1993). Dari aspek metode, penelitian Soleh menggunakan *mixed method* berbasis data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari aspek fokus penelitian, penelitian Soleh berfokus pada kondisi kemiskinan tingkat provinsi, sedangkan penelitian ini berupaya mengidentifikasi akar kemiskinan masyarakat lokal sekaligus merumuskan strategi pemberdayaan berbasis aset yang dimiliki masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Sarjito (2024) yang membahas pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Papua dalam membangun kesatuan bangsa. Dari aspek teori, penelitian Sarjito menggunakan pendekatan identitas sosial, budaya kritis, dan pemberdayaan sosial budaya, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan teori *Deprivation Trap* dan *Asset-Based Community Development*. Dari aspek fokus penelitian, penelitian Sarjito berorientasi pada integrasi sosial dan penguatan identitas masyarakat Papua, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Dari aspek keluaran penelitian, penelitian Sarjito menghasilkan rekomendasi pemberdayaan sosial budaya, sementara penelitian ini menghasilkan strategi pemberdayaan ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian Rauf et al. (2019) yang mengkaji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari aspek teori, penelitian Rauf et al. menggunakan perspektif ekonomi pembangunan dan daya saing wilayah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kemiskinan multidimensional dan pemberdayaan berbasis aset masyarakat. Dari aspek metode, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menggali pengalaman, persepsi, dan kondisi masyarakat secara langsung. Dari aspek hasil yang diharapkan, penelitian Rauf et al. menjelaskan hubungan antarvariabel ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus pada perumusan strategi pemberdayaan yang dapat diterapkan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan masyarakat lokal.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Januar (2019) yang mengkaji peluang dan tantangan Orang Asli Papua dalam menghadapi perkembangan industri di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari aspek teori, penelitian Januar menggunakan perspektif pembangunan industri dan masyarakat lokal, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Deprivation Trap* dan *Asset-Based Community Development*. Dari aspek fokus penelitian, penelitian Januar lebih menekankan peluang dan tantangan yang muncul akibat keberadaan industri migas, sedangkan penelitian ini

berfokus pada identifikasi dimensi kemiskinan yang dialami masyarakat dan pemanfaatan aset lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Dari aspek analisis, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat lokal, tetapi juga memetakan potensi dan aset yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Cobbinah et al. (2013) yang membahas dinamika kemiskinan dan berbagai pendekatan pengurangan kemiskinan pada negara berkembang. Dari aspek teori, penelitian Cobbinah et al. lebih bersifat konseptual dan menekankan pentingnya memahami kemiskinan sesuai konteks lokal, sedangkan penelitian ini menerapkan teori *Deprivation Trap* secara operasional untuk menganalisis kondisi kemiskinan masyarakat Teluk Bintuni. Dari aspek fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas kemiskinan pada konteks global dan nasional, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji masyarakat lokal Kabupaten Teluk Bintuni. Dari aspek kontribusi, penelitian ini menghasilkan model strategi pemberdayaan yang berbasis pada kondisi empiris masyarakat lokal dan potensi yang tersedia di wilayah penelitian.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada empat aspek utama. Pertama, aspek teori, yaitu penggunaan integrasi teori *Deprivation Trap* (Chambers, 1983) dan *Asset-Based Community Development* (Kretzmann & McKnight, 1993) yang belum digunakan secara bersamaan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dianalisis. Kedua, aspek analisis, yaitu mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan melalui lima dimensi *Deprivation Trap* yang meliputi *poverty, physical weakness, isolation, vulnerability,* dan *powerlessness*, kemudian menghubungkannya dengan lima kategori aset dalam pendekatan ABCD yang meliputi aset manusia, aset sosial, aset institusi, aset fisik, dan aset ekonomi. Ketiga, aspek strategi, yaitu merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada permasalahan dan kekurangan masyarakat (*problem-based approach*), tetapi juga berorientasi pada kekuatan dan potensi yang dimiliki masyarakat (*asset-based approach*). Keempat, aspek objek penelitian, yaitu masyarakat lokal Kabupaten Teluk Bintuni yang berada pada wilayah kaya sumber daya alam namun masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan kesejahteraan yang cukup besar.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kontribusi teoritis dan empiris baru berupa integrasi antara analisis akar kemiskinan dan pemetaan aset masyarakat lokal dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengentasan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat lokal, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, potensi aset yang dimiliki masyarakat, serta strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni (Nurdin & Hartati, 2018). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni, laporan perangkat daerah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal dan literatur yang relevan dengan penelitian.

Informan penelitian berjumlah 8 orang, yang terdiri atas Kepala Sub Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni, Kasubag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pelaksana Tugas Sekretaris Distrik Babo, Kepala Distrik Moskona Timur, Kepala Distrik Bintuni, Ketua Yayasan Mumtaz An-Nur sekaligus pemilik Koperasi PT Agro Bintuni, mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Teluk Bintuni, serta Kepala UGD RSUD Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan Mumtaz An-Nur dan pemilik Koperasi PT Agro Bintuni karena memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi (Rahmah et al., 2020). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung (Simangunsong, 2019). Analisis data menggunakan model Miles et al. (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diperdalam menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) melalui penyusunan matriks IFAS dan EFAS, analisis kuadran SWOT, serta matriks SWOT untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat.

Penelitian ini menggunakan teori *Deprivation Trap* dari Chambers (1983) yang terdiri atas dimensi *poverty, physical weakness, isolation, vulnerability,* dan *powerlessness* untuk mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Asset-Based Community Development* (ABCD) dari Kretzmann dan McKnight (1993) yang meliputi aset manusia, aset sosial, aset institusi, aset fisik, dan aset ekonomi untuk mengidentifikasi potensi masyarakat yang dapat diberdayakan sebagai dasar penyusunan strategi pengentasan kemiskinan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dengan fokus pada empat distrik yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda, yaitu Distrik Bintuni, Distrik Manimeri, Distrik Moskona Timur, dan Distrik Babo. Pengumpulan data dilaksanakan selama 20 hari yakni pada tanggal 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Deprivation Trap*

Kemiskinan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, kesehatan, geografis, dan kelembagaan. Berdasarkan teori *Deprivation Trap* dari Chambers (1983), kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga sebagai kondisi yang terbentuk melalui keterkaitan lima dimensi utama, yaitu *proper* (kemiskinan itu sendiri), *physical weakness* (kelemahan fisik), *isolation* (keterasingan), *vulnerability* (kerentanan), dan *powerlessness* (ketidakberdayaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi tersebut saling memperkuat dan membentuk lingkaran kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian besar masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada dimensi *proper*, tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni masih tergolong tinggi dengan persentase penduduk miskin mencapai 25,34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, pemanfaatannya belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal. Aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor subsisten seperti berburu, menangkap ikan, dan berkebun tradisional. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan dana kampung menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki sumber pendapatan yang mandiri dan berkelanjutan. Keterbatasan akses pasar, rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, serta kesulitan memenuhi mekanisme transaksi korporasi menyebabkan peluang ekonomi yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pada dimensi *physical weakness*, kondisi kesehatan masyarakat menjadi faktor yang turut memperkuat kemiskinan. Tingginya kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TBC) mengurangi produktivitas kelompok usia kerja dan meningkatkan beban ekonomi rumah tangga. Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Selain itu, kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia belum berkembang secara optimal dan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Dimensi *isolation* menjadi salah satu faktor paling dominan dalam menjelaskan kemiskinan di Teluk Bintuni. Luas wilayah dan kondisi geografis yang sulit menyebabkan banyak distrik berada dalam kondisi terisolasi. Keterbatasan akses transportasi menghambat mobilitas

masyarakat, distribusi barang, dan akses terhadap layanan dasar. Tingginya biaya logistik mengakibatkan harga kebutuhan pokok di distrik terpencil jauh lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan. Selain keterasingan geografis, masyarakat juga mengalami keterasingan informasi akibat terbatasnya jaringan telekomunikasi dan belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur digital yang telah dibangun. Keterbatasan kehadiran aparatur pemerintah dan tenaga pendamping di wilayah pedalaman semakin mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan peluang ekonomi.

Pada dimensi *vulnerability*, masyarakat lokal sangat rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi maupun sosial. Dalam sektor perikanan, posisi tawar masyarakat masih lemah karena ketergantungan pada tengkulak yang menguasai sarana produksi dan distribusi. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh nelayan relatif kecil meskipun sumber daya perikanan sangat melimpah. Kerentanan juga terlihat dalam pemanfaatan hak ulayat yang belum mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara optimal bagi masyarakat adat. Tekanan ekonomi sering memaksa masyarakat menjual aset produktif, termasuk bantuan usaha yang diberikan pemerintah. Selain itu, pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa berbagai inisiatif ekonomi lokal masih rentan terhadap perubahan kondisi eksternal. Persaingan ekonomi dengan pendatang yang memiliki modal, keterampilan, dan jaringan usaha yang lebih baik juga semakin memperbesar risiko marginalisasi ekonomi masyarakat lokal.

Dimensi terakhir, yaitu *powerlessness*, menggambarkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan peluang pembangunan. Meskipun memiliki hak ulayat atas lahan dan sumber daya alam, sebagian besar masyarakat belum memiliki kapasitas teknis, manajerial, maupun finansial untuk mengelolanya secara produktif. Akibatnya, masyarakat lebih sering menjadi penerima manfaat pasif dibandingkan pelaku utama pembangunan ekonomi. Ketidakberdayaan juga terlihat dari rendahnya kemampuan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan industri besar seperti LNG Tangguh. Di sisi lain, program pemberdayaan yang masih berorientasi pada bantuan tanpa pendampingan berkelanjutan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga masih terbatas sehingga kebutuhan dan aspirasi lokal belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Rendahnya pendapatan, lemahnya kualitas kesehatan, keterasingan wilayah, tingginya kerentanan ekonomi, dan rendahnya posisi tawar masyarakat membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur konektivitas, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

3.2. *Asset-Based Community Development*

Berbeda dengan analisis sebelumnya yang menyoroti berbagai perangkap kemiskinan melalui pendekatan *Deprivation Trap*, subbab ini menggunakan perspektif *Asset-Based Community Development* (ABCD) untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki masyarakat lokal Kabupaten Teluk Bintuni. Pendekatan ini memandang masyarakat bukan sebagai kelompok yang hanya memiliki kekurangan, tetapi sebagai komunitas yang memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian, aset masyarakat lokal dapat dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu aset manusia, aset sosial, aset institusi, aset fisik, dan aset ekonomi.

Pada dimensi aset manusia (*human assets*), masyarakat Teluk Bintuni memiliki potensi sumber daya manusia yang mulai berkembang melalui integrasi pendidikan dengan keterampilan hidup (*life skill*) berbasis potensi lokal. Berbagai program pendidikan telah mengajarkan keterampilan praktis seperti hidroponik, budidaya perikanan air tawar, pemasaran digital, hingga pendidikan vokasional di tingkat perguruan tinggi. Model pendidikan ini memungkinkan generasi muda memperoleh ijazah sekaligus keterampilan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, mulai bermunculan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dan pendidikan tinggi, termasuk kelompok pemuda yang telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta meningkatnya jumlah sarjana di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan kepemimpinan lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya secara lebih profesional. Masyarakat juga memiliki pengetahuan tradisional yang kuat di bidang pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam, yang dapat menjadi fondasi bagi modernisasi sektor pertanian dan perikanan. Potensi demografi pemuda yang besar semakin diperkuat dengan hadirnya program pendidikan inklusif seperti Rumah Pintar yang menyediakan ruang belajar, literasi dasar, dan penguatan kapasitas organisasi bagi masyarakat yang tidak mengakses pendidikan formal secara optimal.

Pada dimensi aset sosial (*social assets*), masyarakat Teluk Bintuni memiliki modal sosial yang sangat kuat berupa gotong royong, solidaritas komunal, dan hubungan kekerabatan yang erat. Nilai saling membantu masih menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat, baik pada komunitas pedalaman maupun wilayah yang lebih heterogen. Tingginya tingkat gotong royong ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial informal yang membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi sehingga mampu menjadi penggerak utama dalam mobilisasi masyarakat untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Integrasi sosial antara Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang juga menunjukkan perkembangan yang positif melalui proses asimilasi dan perkawinan silang yang memperkuat kohesi sosial. Kehadiran lembaga masyarakat sipil seperti Rumah Satu turut menjadi aset sosial penting karena berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Di samping itu, masyarakat masih mempertahankan sistem kearifan lokal seperti sasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi modal sosial yang berpotensi dikembangkan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan dan ekonomi berbasis komunitas. Kesadaran kolektif untuk melindungi ruang ekonomi

masyarakat lokal, seperti perlindungan terhadap usaha sirih pinang yang dijalankan Mama Papua, juga menunjukkan adanya norma sosial yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Pada dimensi aset institusi (*institutional assets*), Kabupaten Teluk Bintuni memiliki berbagai lembaga formal maupun nonformal yang dapat menjadi penggerak pembangunan masyarakat. Pemerintah daerah telah mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis digital melalui *Online Single Submission* (OSS) yang mempermudah masyarakat dalam mengurus legalitas usaha. Transformasi birokrasi menuju sistem digital menjadi peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi formal. Selain institusi pemerintah, berbagai lembaga non-pemerintah seperti yayasan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Di sektor ekonomi, keberadaan koperasi dan BUMDes menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kolektif masyarakat. Inovasi kelembagaan berupa sistem klaster produksi berbasis wilayah telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar industri migas yang sangat besar.

Model kemitraan ini menjadi bukti bahwa kelembagaan lokal mampu membangun hubungan bisnis dengan korporasi besar secara berkelanjutan. Selain itu, kelembagaan adat masih memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur hak ulayat dan pengelolaan wilayah adat. Keberadaan lembaga adat tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat posisi masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri. Berbagai program pemberdayaan yang telah diinisiasi pemerintah daerah juga menunjukkan bahwa kapasitas institusional sebenarnya telah tersedia, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan dan keberlanjutan program.

Pada dimensi aset fisik (*physical assets*), Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kekayaan sumber daya alam dan infrastruktur yang cukup strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi. Di sektor pertanian, tersedia lahan produktif yang telah memiliki kepastian hukum serta didukung oleh fasilitas seperti lumbung pangan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani benih perikanan dan pertanian. Pemerintah daerah juga telah mengembangkan kampung percontohan budidaya perikanan yang dapat menjadi model pengembangan ekonomi berbasis kampung. Dari sisi infrastruktur transportasi, pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama mulai menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar. Infrastruktur pelabuhan dan dermaga juga memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di bidang pelayanan dasar, berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan telah tersedia hingga tingkat distrik, termasuk pembangunan rumah sakit pratama yang memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, Teluk Bintuni memiliki aset fisik berupa situs sejarah dan peninggalan masa kolonial yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah. Infrastruktur publik lainnya seperti jaringan telekomunikasi dan fasilitas air bersih yang telah dibangun pemerintah juga menjadi aset penting yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada dimensi aset ekonomi (*economic assets*), masyarakat Teluk Bintuni sesungguhnya memiliki peluang ekonomi yang sangat besar. Keberadaan industri LNG Tangguh menciptakan pasar pasti (*captive market*) bagi berbagai produk pangan lokal dengan kebutuhan

yang mencapai ribuan pekerja hingga tahun 2030. Pasar ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pemasok produk segar maupun olahan apabila mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Keberhasilan produk ikan asin Weriagar yang telah masuk ke rantai pasok korporasi menunjukkan bahwa peluang tersebut realistis untuk dikembangkan lebih luas. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah membuka peluang hilirisasi berbagai komoditas lokal seperti kepiting, udang, sagu, nanas, dan hasil perikanan lainnya menjadi produk bernilai tambah tinggi. Aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa wilayah pesisir juga menunjukkan tingginya perputaran uang dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan perbankan.

Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui konsep *community-based tourism* yang memungkinkan rumah warga berfungsi sebagai homestay sehingga manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat lokal. Peluang ekonomi juga muncul dari pengembangan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, seperti produk kulit buaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada tingkat rumah tangga, keberadaan pangan lokal seperti sagu, petatas, singkong, dan hasil laut menjadi aset ekonomi dasar yang berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah.

Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan bahwa masyarakat lokal Kabupaten Teluk Bintuni memiliki berbagai aset strategis yang dapat menjadi fondasi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Aset manusia yang mulai berkembang, modal sosial yang kuat, kelembagaan yang semakin terbuka, infrastruktur yang terus bertambah, serta peluang ekonomi yang besar menunjukkan bahwa persoalan utama masyarakat bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada belum optimalnya proses pengorganisasian, penguatan kapasitas, dan integrasi aset-aset tersebut ke dalam rantai nilai ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat perlu difokuskan pada upaya menghubungkan seluruh aset yang dimiliki agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

3.3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan

Analisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan mengintegrasikan teori *Deprivation Trap* dari Chambers dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dari Kretzmann dan McKnight. Teori *Deprivation Trap* digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor kelemahan dan ancaman yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan, sedangkan teori ABCD digunakan untuk memetakan aset, potensi, dan peluang yang dimiliki masyarakat lokal sebagai modal pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kekuatan utama masyarakat Teluk Bintuni meliputi kekayaan sumber daya alam berupa kepiting, udang, dan sagu yang melimpah; hak ulayat masyarakat adat atas lahan, sungai, dan laut; kearifan lokal seperti sistem sasi dan pengolahan produk lokal; solidaritas sosial yang kuat; meningkatnya jumlah sumber daya manusia berpendidikan; keberadaan kelembagaan adat; potensi wisata alam; serta tersedianya beberapa

infrastruktur produksi. Sementara itu, peluang yang tersedia meliputi dukungan dana CSR perusahaan migas, Dana Desa dan BUMDes, tingginya permintaan pasar regional, pasar katering LNG Tangguh yang melayani ribuan pekerja, pembangunan infrastruktur transportasi, keberadaan koperasi lokal, peluang kerja sama riset dan inovasi, serta program beasiswa vokasional.

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah kelemahan internal yang masih menghambat pemberdayaan masyarakat, yaitu rendahnya kapasitas SDM Orang Asli Papua (OAP) untuk memenuhi standar industri dan korporasi, tingginya masalah kesehatan dan sanitasi, mentalitas ketergantungan, rendahnya partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, minimnya fasilitas bagi kelompok rentan, rendahnya literasi keuangan, kebiasaan menjual aset produktif saat menghadapi tekanan ekonomi, serta pelatihan yang belum diikuti pendampingan berkelanjutan. Selain itu, terdapat berbagai ancaman eksternal berupa dominasi pelaku usaha pendatang, praktik eksploitasi oleh tengkulak, keterisolasian geografis, kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan sosial, hambatan birokrasi dan politik, rendahnya serapan anggaran, kecemburuan sosial, serta terbatasnya manfaat langsung industri ekstraktif bagi masyarakat lokal.

Hasil perhitungan matriks IFAS menunjukkan skor kekuatan sebesar 1,80 dan kelemahan sebesar 2,09 sehingga menghasilkan nilai koordinat internal sebesar -0,29. Sementara itu, matriks EFAS menghasilkan skor peluang sebesar 1,73 dan ancaman sebesar 1,61 sehingga menghasilkan nilai koordinat eksternal sebesar +0,12. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Teluk Bintuni pada Kuadran III (*Turn-Around Strategy*) dalam analisis SWOT. Posisi ini menunjukkan bahwa peluang eksternal yang tersedia sebenarnya cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih kuatnya kelemahan internal masyarakat.

Berdasarkan posisi tersebut, strategi utama yang direkomendasikan adalah Strategi *Weakness–Opportunity* (WO) yang berfokus pada perbaikan kapasitas internal masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Strategi pertama adalah pelatihan standar higiene, sanitasi, dan rantai dingin (*cold chain*) bagi masyarakat agar mampu memenuhi standar pemasok perusahaan migas dan industri katering. Strategi kedua adalah peningkatan literasi keuangan, khususnya terkait pengelolaan modal usaha dan sistem pembayaran tidak tunai yang umum digunakan dalam dunia usaha modern. Strategi ketiga berupa pendampingan ekonomi berbasis klaster secara berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya menerima pelatihan, tetapi juga mendapatkan bimbingan hingga usaha berjalan secara mandiri. Strategi keempat adalah menjadikan pemerintah daerah sebagai pembeli awal (*off-taker*) produk masyarakat guna memberikan kepastian pasar. Strategi kelima adalah pembentukan dana simpan pinjam komunitas berbasis adat untuk mencegah masyarakat menjual aset produktif ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Selain strategi prioritas tersebut, penelitian juga menghasilkan strategi *Strength–Opportunity* (SO) yang berorientasi pada pemanfaatan aset yang dimiliki masyarakat. Strategi ini dilakukan melalui hilirisasi sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah seperti makanan olahan berbasis hasil laut dan sagu, serta pengembangan kampung budidaya perikanan berbasis dukungan infrastruktur pemerintah yang telah tersedia. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal dan memperluas akses masyarakat terhadap pasar yang lebih besar.

Strategi berikutnya adalah *Strength–Threat* (ST) yang bertujuan memanfaatkan kekuatan masyarakat untuk mengurangi ancaman yang dihadapi. Bentuk strategi ini antara lain pembangunan pabrik es komunal yang dikelola oleh BUMDes guna mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, serta formalisasi sistem sasi ke dalam regulasi daerah sebagai instrumen perlindungan sumber daya alam dan penguatan hak masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya.

Sementara itu, strategi *Weakness–Threat* (WT) diarahkan sebagai langkah defensif untuk mengurangi dampak kelemahan dan ancaman secara bersamaan. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan jaring pengaman sosial dan pangan berbasis gotong royong masyarakat. Keberadaan mekanisme perlindungan sosial tersebut penting untuk menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga ketika menghadapi krisis, inflasi, maupun guncangan sosial lainnya.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh strategi yang dirumuskan memiliki tingkat keselarasan yang tinggi dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025–2029. Strategi peningkatan kapasitas SDM dan UMKM sejalan dengan Program Pengembangan UMKM serta Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas. Strategi pendampingan berbasis klaster sesuai dengan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi pemerintah sebagai pembeli awal produk masyarakat sejalan dengan Program Stabilitas Harga dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Pangan. Hilirisasi produk lokal mendukung Program Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sementara itu, penguatan sistem sasi memperoleh legitimasi melalui Program Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal. Adapun jaring pengaman sosial sejalan dengan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki landasan empiris, teoritis, dan institusional yang kuat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama masyarakat lokal bukan terletak pada ketiadaan sumber daya maupun peluang ekonomi, melainkan pada lemahnya kapasitas internal masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan peluang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan lokal, serta integrasi antara aset masyarakat dan peluang pembangunan daerah menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan fenomena multidimensional yang terbentuk melalui interaksi antara rendahnya pendapatan masyarakat, lemahnya kualitas kesehatan, keterasingan wilayah, tingginya kerentanan ekonomi, serta rendahnya posisi tawar masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan. Berdasarkan analisis *Deprivation Trap* Chambers (1983), masyarakat masih menghadapi berbagai perangkap kemiskinan yang saling memperkuat, terutama pada dimensi *isolation* dan *powerlessness*. Di sisi lain, hasil pemetaan menggunakan pendekatan *Asset-*

Based Community Development (ABCD) menunjukkan bahwa masyarakat Teluk Bintuni sesungguhnya memiliki aset yang cukup besar berupa sumber daya alam yang melimpah, modal sosial yang kuat, kelembagaan adat yang masih berfungsi, potensi sumber daya manusia yang berkembang, serta peluang ekonomi yang terbuka melalui keberadaan industri LNG Tangguh. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama masyarakat bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada belum optimalnya kapasitas masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki secara produktif dan berkelanjutan.

Secara substantif, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang paling relevan bagi masyarakat lokal Teluk Bintuni adalah strategi pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pendampingan berkelanjutan, serta integrasi aset lokal ke dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi Kabupaten Teluk Bintuni berada pada Kuadran III (*turn-around strategy*), yang berarti peluang pembangunan sebenarnya sangat besar, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih kuatnya kelemahan internal masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan sosial atau bantuan ekonomi semata, tetapi harus diarahkan pada upaya membangun kemandirian masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Soleh (2018) yang menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang memerlukan strategi pengentasan yang terencana dan terintegrasi. Kesamaan tersebut terlihat dari pentingnya intervensi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan Soleh (2018) karena tidak hanya mengidentifikasi kondisi kemiskinan dan strategi pengentasan pada level makro, tetapi juga menjelaskan secara rinci akar penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat lokal melalui lima dimensi *Deprivation Trap*. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu berorientasi pada penguatan aset masyarakat, bukan hanya pada pengurangan kekurangan yang dimiliki masyarakat miskin.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Rauf et al. (2019) yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Tingginya kasus HIV/AIDS dan TBC, rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal, serta terbatasnya kemampuan masyarakat memenuhi standar industri menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan Rauf et al. (2019) karena tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel ekonomi secara statistik, tetapi juga menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan, pendidikan, dan kapasitas masyarakat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Januar (2019) yang menunjukkan bahwa keberadaan industri di Kabupaten Teluk Bintuni menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Orang Asli Papua (OAP). Kesamaan tersebut terlihat pada temuan bahwa masyarakat lokal masih menghadapi berbagai kendala berupa rendahnya pendidikan, keterampilan, modal usaha, serta kapasitas kelembagaan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LNG Tangguh sebenarnya menciptakan pasar yang sangat besar bagi produk lokal, namun sebagian besar masyarakat belum mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, dan persyaratan administrasi yang ditetapkan industri. Akan tetapi, penelitian ini memperluas temuan Januar (2019) dengan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi melalui strategi pemberdayaan berbasis aset, seperti pengembangan klaster usaha, peningkatan literasi keuangan, pelatihan standar industri, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga mendukung perspektif Cobbinah et al. (2013) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat kontekstual sehingga strategi pengentasannya harus disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik geografis Teluk Bintuni yang luas dan terisolasi menyebabkan dimensi *isolation* menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan daerah lain yang memiliki kondisi geografis berbeda. Penelitian ini memperluas temuan Cobbinah et al. (2013) dengan menerapkan konsep kemiskinan multidimensional secara operasional pada konteks masyarakat lokal Papua serta menghubungkannya dengan pendekatan ABCD sebagai dasar penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Sarjito (2024) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Papua memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat integrasi sosial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial dan budaya yang kuat belum secara otomatis mampu mengurangi kemiskinan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni. Meskipun masyarakat masih memiliki solidaritas komunal yang tinggi, kelembagaan adat yang kuat, serta kearifan lokal seperti sistem sasi, kondisi kemiskinan tetap relatif tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan modal sosial saja tidak cukup untuk mendorong peningkatan kesejahteraan apabila tidak didukung oleh kapasitas ekonomi, akses pasar, keterampilan usaha, dan konektivitas wilayah yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dari Sarjito (2024) dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial budaya perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kemiskinan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterasingan wilayah, lemahnya posisi tawar ekonomi, serta belum optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Chambers (1983) bahwa kemiskinan merupakan perangkap yang

terbentuk dari berbagai dimensi yang saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara teori *Deprivation Trap* dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam menganalisis kemiskinan dan merumuskan strategi pengentasan kemiskinan masyarakat lokal di Kabupaten Teluk Bintuni. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada faktor penyebab kemiskinan, indikator ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, atau dampak pembangunan industri secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus menghubungkan analisis akar kemiskinan dengan pemetaan aset yang dimiliki masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi, mengelola, dan mengembangkan aset yang dimiliki menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi yang besar, namun belum sepenuhnya optimal karena masih kuatnya berbagai faktor yang membentuk perangkap kemiskinan. Berdasarkan teori *Deprivation Trap* Chambers (1983), dimensi *proper* menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi akibat rendahnya pendapatan dan ketergantungan terhadap aktivitas ekonomi subsisten. Pada dimensi *physical weakness*, kualitas kesehatan dan sumber daya manusia masih menjadi kendala yang memengaruhi produktivitas masyarakat. Dimensi *isolation* menunjukkan bahwa keterisolasian geografis, tingginya biaya logistik, dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor dominan yang memperkuat kemiskinan. Sementara itu, pada dimensi *vulnerability*, masyarakat masih rentan terhadap tekanan ekonomi, ketergantungan pada tengkulak, serta guncangan eksternal. Pada dimensi *powerlessness*, rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memenuhi standar industri menyebabkan peluang ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), masyarakat Teluk Bintuni sebenarnya memiliki aset manusia, sosial, institusi, fisik, dan ekonomi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, berbagai aset tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam rantai nilai ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang paling relevan adalah peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan lokal, serta pengembangan ekonomi

berbasis aset dan potensi daerah agar masyarakat mampu menjadi pelaku utama pembangunan dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan waktu penelitian yang terbatas sehingga belum memungkinkan untuk mengamati secara longitudinal perubahan kondisi kemiskinan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada masyarakat lokal dan Orang Asli Papua (OAP), sehingga belum mengkaji secara mendalam dinamika hubungan ekonomi antara masyarakat lokal, pelaku usaha pendatang, dan industri besar yang turut memengaruhi proses pengentasan kemiskinan. Keterbatasan lainnya adalah analisis strategi yang disusun masih berdasarkan kondisi empiris dan persepsi para informan pada saat penelitian berlangsung, sehingga efektivitas implementasi strategi yang direkomendasikan belum dapat dievaluasi secara langsung dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi strategi pemberdayaan masyarakat yang direkomendasikan, khususnya pendampingan berbasis klaster, peningkatan literasi keuangan, penguatan kelembagaan adat dan ekonomi lokal, serta integrasi produk masyarakat ke dalam rantai pasok industri LNG Tangguh. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk menganalisis perubahan tingkat kemiskinan, kapasitas masyarakat, dan keberlanjutan usaha lokal dari waktu ke waktu.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2024). *Provinsi Papua Barat dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. https://papuabarat.bps.go.id/publication/2024/02/28/1abcd220e6df6bf3af905766/provinsi-papua-barat-dalam-angka-2024.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni. (2024). *Kabupaten Teluk Bintuni dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni. https://telukbintunikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/44dbee53adecb99ad07e5554/kabupaten-teluk-bintuni-dalam-angka-2024.html

Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.

Chen, H., Xu, Y., Tackie, E. A., & Ahakwa, I. (2024). Assessing the impact of asset-based community development approach on rural poverty alleviation in Ghana: The moderating role of government policies. *SAGE Open*, *14*(1). https://doi.org/10.1177/21582440231226020

Cobbinah, P. B., Black, R., & Thwaites, R. (2013). Dynamics of poverty in developing countries: Review of poverty reduction approaches. *Journal of Sustainable Development, 6*(9), 25–35. https://doi.org/10.5539/jsd.v6n9p25

Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, & Simangungsong, F. (2023). Collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, East Java Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13*(1), 66-77. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Januar, A. (2019). Peluang dan tantangan orang asli Papua menghadapi perkembangan industri di Kabupaten Teluk Bintuni. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 11*(3), 399–414. https://www.researchgate.net/publication/337488131_PELUANG_DAN_TANTANGAN_ORANG_ASLI_PAPUA_MENGHADAPI_PERKEMBANGAN_INDUSTRI_DI_KABUPATEN_TELUK_BINTUNI

Jeddawi, M., Rossad, A., Rahman, A., Faisal, M., & Jamaruddin. (2025). Dialektika Kemiskinan dengan desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja,* 51(2), 121-135. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/6054

Kamruzzaman, P. (2020). Exploring the nexus between participation and empowerment. *Journal of Development Policy and Practice, 5*(1), 1–18. https://doi.org/10.1177/2455133320909926

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Center for Urban Affairs and Policy Research, Northwestern University.

Mason, D. R., & Beard, V. A. (2008). Community-based planning and poverty alleviation in Oaxaca, Mexico. *Journal of Planning Education and Research, 27*(3), 245–260. https://doi.org/10.1177/0739456X07306394

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nugroho, F., & Alifa, S. (2025). Empowerment and post-disaster poverty reduction by a local community organisation in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 35*(1), 1–18. https://doi.org/10.1177/25166026251319886

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.

Rahmah, M., Ekowati, M., Nalien, Elvira. M., Praja, S. J., Saribulan, N., Wulandari, S., & Rahman, H. (2020). Metodologi penelitian terapan. CV. Sketsa Media.

Rauf, B., Tamsah, H., & Yahya, M. (2019). Daya saing wilayah dan pengaruh product domestic regional bruto perkapita serta indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *YUME: Journal of Management, 2*(1), 1–16. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/351

Rwebugisa, L. J., & Usinger, J. (2021). Empowerment through genuine participation: Giving voice to the neglected majority. *Journal of Development Policy and Practice*, *6*(2), 144–167. https://doi.org/10.1177/24551333211035181

Sarjito, A. (2024). Membangun kesatuan bangsa melalui pendekatan pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat Papua. *Journal of Governance and Policy Innovation, 4*(1), 1–13. https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.472

Simangunsong, F. (2019). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Soleh, A. (2018). Analisis dan strategi pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9*(1), 79–90. https://doi.org/10.33087/eksis.v9i1.135